

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Penyaluran Bansos Dianggap Salah Sasaran
Entitas / Cakupan	: Kota Bogor
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.7
Edisi	: Jum'at, 09 Maret 2018

## *Penyaluran Bansos Dianggap Salah Sasaran*

### **BOGOR, (PR).-**

Puluhan perempuan yang didominasi ibu rumah tangga dan lanjut usia berunjuk rasa di Balai Kota Bogor, Kamis (8/3/2018). Mereka mempertanyakan penyaluran bantuan sosial yang dianggap tidak tepat sasaran.

Sebagian besar peserta aksi berasal dari Kecamatan Bogor Barat dan Bogor Selatan. Mereka protes karena tidak mendapatkan bantuan sosial meski tergolong masyarakat miskin. Salah seorang di antaranya Anah (60). Dia mengaku tidak pernah mendapat bantuan tersebut.

Koordinator massa Dentiara DS mengatakan, permasalahan utama dalam program bantuan sosial ialah pendataan

keluarga penerima manfaat (KPM).

"Banyak penerima bantuan yang salah sasaran karena ketidakakuratan data. Hal itu bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat," kata Dentiara. Karena itu, ia sengaja mendatangi masyarakat miskin yang tidak tersentuh bantuan tersebut ke balai kota agar diketahui pemerintah daerah setempat.

Menurut dia, beberapa wilayah yang diduga penerima bantuannya salah sasaran misalnya di Kampung Bangkong yang terletak di bantaran sungai tak jauh dari Tugu Kujang.

Dentiara menemukan pembatasan penerima bantuan sebanyak 7 atau 8 keluarga per RT sehingga menimbulkan kecemburuan keluarga miskin yang

tidak menerima bantuan.

Perwakilan aksi lainnya, Dika Mochammad menganggap penambahan kuota penerima bantuan sosial menunjukkan ketidakakuratan data tersebut. "Angka 40 persen keluarga miskin dari jumlah penduduk Indonesia juga dipertanyakan karena metode pemerintah dalam menentukan kategori miskin tidak relevan lagi," katanya.

Menurut dia, survei yang dilakukan pemerintah justru tidak melibatkan masyarakat miskin. Dika beralasan, masyarakat tidak mengetahui kapan survei tersebut dilakukan petugas dinas terkait. Ia menduga data masyarakat miskin hanya berdasarkan laporan pejabat daerah setempat, bukan survei.

Menanggapi tuntutan massa, Sekretaris Dinsos Kota Bogor Juniarti Estiningsih menjelaskan, pendataan keluarga miskin diatur oleh petugas di setiap kelurahan.

"Kalau mau pengajuan ke kelurahan, tapi tadi kata perwakilan anggota aksi hal tersebut tidak ada. Jadi nanti akan diadakan sosialisasi ulang," katanya.

Dalam pertemuan dinas terkait dengan perwakilan massa juga disepakati Pemerintah Kota Bogor menerima data masyarakat miskin yang diajukan peserta aksi. Data tersebut menurut Juniarti akan diverifikasi terlebih dulu sebelum diserahkan ke kepala dinas untuk disetujui. **(Hilmi Abdul Halim)**

\*\*\*